

CORAK HUBUNGAN ANTAR-SUKUBANGSA SETEMPAT DAN PRODUK KONFLIKNYA: Kasus Kerusuhan Berdarah di Wilayah Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat

Parsudi Suparlan

Pendahuluan

Tulisan ini adalah mengenai konflik antar-sukubangsa yang telah terjadi di kabupaten Sambas antara orang Melayu dan orang Dayak di satu pihak dengan orang Madura di pihak lain. Konflik antara orang Melayu dengan orang Madura telah terjadi pada tahun 1999, yang merupakan sebuah konflik yang pertama terjadi dan yang terakhir. Karena setelah konflik tersebut berakhir orang-orang Madura terusir dari wilayah kabupaten Sambas. Sedangkan konflik antara orang Dayak dan orang Madura telah berlangsung selama 11 kali sejak tahun 1962 yang berakhir pada tahun 1999. Konflik Dayak-Madura pada tahun 1999 terjadi pada saat sedang berlangsungnya konflik antara orang Melayu dan Madura.

Konflik antar-sukubangsa terlahir dari dan ada dalam wadah hubungan antar-sukubangsa yang bersangkutan. Hakikat dari corak hubungan antar-sukubangsa yang bersangkutan merupakan penentu dari terjadi atau tidak terjadinya konflik antar-sukubangsa. Dari kasus-kasus konflik antar-sukubangsa di Ambon, Poso, Kalimantan Tengah dan di berbagai tempat lainnya di Indonesia dapat disimpulkan bahwa konflik antar-

untuk memperebutkan sumber-sumber daya setempat yang dilakukan oleh individu-individu yang merupakan anggota komuniti-komuniti suku bangsa setempat dengan individu-individu yang menjadi anggota komuniti-komuniti sukubangsa pendatang atau keturunan pendatang. Konflik antar-sukubangsa tersebut berkembang menjadi konflik antar-sukubangsa karena salah satu pihak mengaktifkan kesukubangsaan untuk solidaritas kelompoknya guna mengalahkan pihak lainnya, sehingga pihak lainnya tersebut mau tidak mau akan harus mengimbanginya dengan mengaktifkan juga kesukubangsaannya.

Tulisan ini berusaha untuk menunjukkan bahwa konflik antar-sukubangsa yang terjadi di kabupaten Sambas antara orang Melayu dan Dayak dengan orang Madura adalah produk dari corak hubungan antar-sukubangsa Melayu dengan Madura dan antar-sukubangsa Dayak dengan Madura di kabupaten Sambas. Dalam konflik tersebut para tokoh atau elit masing-masing kelompok sukubangsa yang ada di kabupaten Sambas maupun di provinsi Kalimantan ikut bermain, dan bahkan memainkan peranan penting dalam menentukan sejumlah strategi untuk menghancurkan

Melalui tulisan ini juga ingin ditunjukkan bahwa konflik antar-sukubangsa adalah konflik antar golongan sehingga dalam konflik tersebut bukan hanya terdapat upaya saling menghancurkan orang-orang yang ciri-cirinya tergolong sebagai pihak lawan tetapi juga penghancuran terhadap segala sesuatu yang mempunyai ciri-cirinya dari golongan sukubangsa lawan. Tulisan ini akan menyajikan pembahasan mengenai hakekat masyarakat majemuk Indonesia dan heterogenitas masyarakat setempat atau lokal yang merupakan wadah yang menjadi konteks dari konflik antar-sukubangsa dan konflik antar-sukubangsa. Tulisan ini akan diakhiri dengan penyajian deskripsi konflik antar orang Melayu dengan Madura dan antara orang Dayak dengan orang Madura di kabupaten Sambas.

Masyarakat Majemuk dan Heterogenitas Masyarakat Setempat

Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk (*plural society*), yaitu sebuah masyarakat yang terdiri atas masyarakat-masyarakat sukubangsa yang dipersatukan oleh sistem nasional sebagai sebuah sebagai bangsa atau *nation* dalam wadah negara (lihat Suparlan 1979, 1999a). Model masyarakat majemuk yang dikenal dalam ilmu-ilmu sosial ini bermula dari Furnivall (1948) yang mengidentifikasi masyarakat jajahan Hindia Belanda sebagai sebuah masyarakat majemuk. Furnivall melihat

sebagai sebuah masyarakat yang terdiri atas kumpulan orang-orang atau kelompok-kelompok yang berbau tapi tidak menjadi satu. Masing-masing kelompok mempunyai agama, kebudayaan, dan bahasa, serta cita-cita dan cara-cara hidup mereka masing-masing (lihat Suparlan, 2000: 1)

Lebih lanjut dikatakan oleh Furnivall (Suparlan, 2000: 1) bahwa masyarakat seperti ini terdiri atas bagian-bagian atau segmen-segmen yang merupakan komuniti-komuniti yang hidup saling berdampingan dalam sebuah satuan politik, tetapi yang secara keseluruhan saling terpisah atau tidak merupakan sebuah kesatuan. Mereka ini merupakan sebuah masyarakat karena dipersatukan secara paksa oleh pemerintahan nasional, yaitu pemerintah jajahan Hindia Belanda. Kekuasaan absolut berada di tangan sejumlah kecil golongan elite, yang merupakan penguasa jajahan yang dominan, yang menuntut penyerahan absolut dari masyarakat jajahan demi kepentingan penguasa jajahan tersebut adalah penguasaan atas sumber-sumber daya ekonomi dan alam serta pendistribusiannya.

Masyarakat majemuk pada umumnya mempunyai ciri yang menyolok dalam hal corak pemerintahannya, yaitu bercorak otoriter dan militeristik sebagaimana yang menjadi corak dari semua pemerintahan di masyarakat jajahan. Coraknya yang otoriter dan militeristik ini juga terdapat dalam masyarakat majemuk.

dirombak oleh kekuatan reformasi, seperti Uni Soviet Rusia, Yugoslavia, Afrika Selatan, dan Indonesia di masa pemerintahan Orde Baru. Ciri-ciri dari masyarakat majemuk yang otoriter dan militeristik ini terutama berbentuk kekejaman dan kekerasan terhadap rakyat atau warga masyarakatnya sendiri (van den Berghe, 1990). Kekejaman dan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri tersebut dilakukan dalam upaya menguasai secara absolut semua sumber-sumber daya ekonomi dan alam oleh penguasa dan oknum-oknum serta kroni-kroninya.

Masalah yang pada umumnya dihadapi oleh sebuah masyarakat majemuk, seperti Indonesia, adalah hubungan antara sistem nasional atau pemerintah pusat dengan masyarakat-masyarakat sukubangsa yang terakup dalam masyarakat majemuk tersebut. Masyarakat-masyarakat sukubangsa telah ada sebelum adanya masyarakat majemuk yang dikuasai oleh sistem nasional. Masyarakat-masyarakat sukubangsa tersebut hidup di wilayahnya dan dari sumber-sumber daya yang ada dalam lingkungan alam dan fisik yang merupakan hak adat atau hak *ulayat* mereka. Permasalahan mengenai hak eksploitasi atas sumber-sumber daya tersebut muncul pada waktu rezim yang berkuasa itu berusaha untuk menguasai sumber-sumber daya alam yang ada dalam wilayah hak *ulayat* masyarakat-masyarakat sukubangsa setempat dengan menggunakan acuan hukum nasional yang menapikan

hukum adat atau hak *ulayat* warga masyarakat setempat.

Pada waktu rezim penguasa yang otoriter tersebut masih berkuasa tidak ada satupun warga masyarakat tersebut yang berani menentangnya, dan tidak juga kelompok-kelompok atau masyarakat-masyarakat suku-bangsa yang dieksploitasi hak *ulayat*nya tersebut berani menghalanginya. Tetapi, begitu rezim otoriter itu jatuh maka berbagai bentuk perambahan dan perampokan terhadap perusahaan-perusahaan milik dari oknum-oknum pemerintah pusat dan kroni-kroninya bermunculan sebagai kerusuhan-kerusuhan sosial, dan konflik antar-sukubangsa bermunculan (Suparian 2000a, 2000b, 2001). Pendapat umum yang mengatakan bahwa kebangkitan dari mereka yang semula tertekan oleh rezim otoriter dan militeristik tidaklah dapat disangkal. Tetapi pendapat para pakar yang di tahun-tahun 1999-2001 yang bermunculan di berbagai stasiun televisi di Indonesia yang mengatakan bahwa konflik antar-sukubangsa disebabkan oleh adanya kesenjangan sosial ekonomi antara kelompok sukubangsa pendatang yang makmur hidupnya dan kelompok sukubangsa setempat yang hidupnya melarat tidaklah benar.

Di masa lampau masyarakat-masyarakat sukubangsa hidup dengan berpedoman pada kebudayaan masing-masing yang berlaku di dalam wilayah masyarakat sukubangsanya sendiri. Anggota-anggota dari setiap masyarakat sukubangsa hidup dalam

komuniti-komuniti sukubangsa yang pada dasarnya bercorak homogen dengan masing-masing jatidiri suku-bangsa dan jatidiri budayanya dalam batas-batas wilayahnya sendiri. Di kampung halamannya sendiri, masyarakat-masyarakat sukubangsa setempat dengan kebudayaan masing-masing adalah yang dominan sebagai pedoman bagi kehidupan sehari-hari sebagaimana terwujud dalam pranata-pranata sosial mereka masing-masing. Di masa lampau hanya di kota-kota atau kota-kota pelabuhan dan pusat-pusat perkotaan terdapat masyarakat campuran dari berbagai kelompok sukubangsa. Sedangkan pada masa sekarang hampir seluruh wilayah Indonesia secara sukubangsa telah menjadi masyarakat-masyarakat yang heterogen, di mana anggota-anggota dari berbagai sukubangsa hidup secara berdampingan dalam komuniti-komuniti pedesaan dari kelompok-kelompok sukubangsa setempat. Karena itu, pada masa sekarang, hubungan antar-sukubangsa telah menjadi lebih intensif dan kompleks daripada yang berlaku dimasa lampau.

Hal ini dapat menyebabkan munculnya masalah-masalah sosial berkenaan dengan kesukubangsaan serta batas-batas sukubangsa dan perbedaan-perbedaan kebudayaan ekonomi antara para pendatang dengan penduduk setempat, karena hampir semua pendatang yang hidup dalam komuniti-komuniti masyarakat setempat mempunyai kebudayaan ekonomi yang lebih maju dan agresif

dari masyarakat sukubangsa setempat yang semula adalah dominan menjadi ditantang dengan agresifitas para pendatang, yang tantangan tersebut dapat dilihat sebagai tantangan atas kebudayaan sukubangsa dari masyarakat dan komuniti-komuniti sukubangsa setempat. Ini terutama terwujud melalui hubungan antara pendatang dengan warga masyarakat setempat yang terpusat pada hubungan kompetisi untuk memperebutkan sumber-sumber daya, yang memunculkan berbagai permasalahan sosial. Permasalahan yang paling kritikal adalah tingkat agresifitas ekonomi para pendatang dalam persaingan untuk memperebutkan sumber-sumber daya dengan cara tidak mengindahkan berbagai aturan yang teradatkan yang berlaku setempat. Karena anggota-anggota masyarakat setempat melihat diri mereka sebagai tuan rumah dan para pendatang sebagai tamu mereka maka perbuatan para pendatang tersebut dilihat sebagai melanggar aturan-aturan adat yang berlaku.

Aturan-aturan yang mengatur hubungan antara tuan rumah dengan tamunya tersirat dalam pepatah yang berlaku dalam kehidupan semua masyarakat sukubangsa di Indonesia, yang berbunyi "di mana bumi dipijak langit dijunjung". Artinya para pendatang yang hidup dalam komuniti sukubangsa setempat supaya menghormati dan menjunjung adat dan tradisi budaya yang berlaku setempat supaya menghormati dan

yang berlaku setempat dengan cara mengikuti aturan-aturan adat dan tradisi-tradisi budaya dalam kehidupan sehari-hari mereka, terutama di tempat-tempat umum. Pepatah ini digunakan oleh warga masyarakat setempat untuk memantapkan posisi mereka dalam menghadapi agresifitas ekonomi dari para pendatang dengan cara menekankan bahwa posisi mereka adalah tuan rumah yang berhak atas segala sesuatu yang ada di dalam rumahnya sedangkan para pendatang hanya tamu yang harus tunduk pada aturan-aturan yang berlaku dalam rumah tersebut. Dengan mengacu pada pepatah ini, secara halus dan tidak langsung, para pendatang diberi peringatan untuk tidak mendominasi kehidupan mereka yang menjadi tuan rumah. Konflik-konflik antar-sukubangsa yang telah terjadi di berbagai daerah di Indonesia dapat dilihat sebagai pelanggaran dari prinsip yang ada dalam pepatah tersebut.

Sukubangsa dan Kesukubangsaan

Sukubangsa dilihat sebagai golongan sosial askriptif, golongan sosial yang didapat begitu saja oleh seseorang yaitu "yang mengklasifikasikan seseorang berdasarkan atas identitasnya yang paling umum dan mendasar, yang berkaitan dengan asal muasal dan latar belakangnya" (Barth 1969). Sebagai golongan sosial askriptif sukubangsa mewujudkan dirinya dalam bentuk individu atau orang per orang dan dalam bentuk kelompok serta masyarakat. Setiap

orang dan setiap masyarakat mempunyai kebudayaan. Dan setiap masyarakat sukubangsa mempunyai kebudayaan sukubangsa. Kebudayaan dilihat sebagai *blueprint* atau pedoman bagi kehidupan, sebagai perangkat sistem-sistem acuan atau model kognitif dan afektif yang beroperasi pada berbagai tingkat perasaan dan kesadaran. Manusia menggunakan model-model tersebut secara selektif, sebagaimana yang paling cocok dengan mereka masing-masing, untuk mendorong terciptanya interpretasi-interpretasi yang penuh makna bagi diri mereka mengenai situasi-situasi yang dihadapi dan memedomani tindakan-tindakan mereka dalam lingkungan-lingkungan mereka, melalui kegiatan-kegiatan mereka. Tindakan-tindakan tersebut dapat dilihat sebagai dorongan-dorongan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup maupun sebagai tanggapan-tanggapan terhadap struktur-struktur kekuatan yang ada dalam lingkungan-lingkungan mereka. Kebudayaan dan golongan sosial dapat dinyatakan sebagai sistem-sistem acuan dari interpretasi-interpretasi dan tanggapan-tanggapan. Dalam pendekatan ini kekuatan sosial dari para pelaku diperhitungkan, yaitu dalam tindakan-tindakan mereka di dalam interaksi-interaksi dan dalam struktur-struktur kekuatan yang berlaku setempat.

Keyakinan keagamaan selalu menempel pada dan ada dalam kebudayaan dan kesukubangsaan seseorang dan dalam kelompok

keagamaan biasanya memperkuat kesukubangsaan yang mempertegas batas-batas kesukubangsannya dengan kesukubangsaan dari orang atau kelompok sukubangsa yang lainnya. Tetapi sesuatu keyakinan keagamaan yang sama juga dimiliki oleh orang dan kelompok atau kelompok-kelompok sukubangsa yang berbeda-beda. Sehingga, keyakinan keagamaan di satu sisi dapat memperkuat kesukubangsaan dari satu kelompok sukubangsa dalam hubungannya dengan sukubangsa lain, tetapi dari sisi lainnya keyakinan keagamaan juga dapat meredupkan kesukubangsaan dari kelompok-kelompok sukubangsa yang mempunyai kelompok sukubangsa dalam hubungannya dengan sukubangsa lain, tetapi dari sisi lainnya keyakinan keagamaan juga dapat meredupkan kesukubangsaan dari kelompok-kelompok sukubangsa yang mempunyai keyakinan keagamaan yang sama. Dalam keadaan terakhir tersebut di atas, justru jatidiri keagamaanlah yang menonjol dan meredupkan jatidiri sukubangsa dalam hubungan antar-sukubangsa dalam hubungan antar-sukubangsa. Walaupun demikian tidak berarti bahwa dua kelompok sukubangsa yang mempunyai keyakinan keagamaan yang sama tetapi dalam keadaan konflik antar-sukubangsa akan menghentikan konflik tersebut. Orang Melayu dan orang Madura di Sambas sama-sama memeluk agama Islam, tetapi dalam konflik yang terjadi pada tahun 1999

tersebut tidak mempunyai makna apapun dalam upaya mendamaikan konflik tersebut.

Sukubangsa dan Hipotesa Kebudayaan Dominan

Sukubangsa sebagai golongan sosial yang askriptif mempunyai ciri primordial atau golongan sosial askriptif dan kebudayaan yang pertama dan mendasar yang didapat serta yang utama dalam kehidupan manusia. Seseorang tergolong dalam sesuatu sukubangsa karena dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tua yang tergolong dalam sesuatu sukubangsa tersebut. Dia dibesarkan oleh orangtua dan dijadikan manusia dengan menggunakan kebudayaan orangtuanya sebagai acuannya. Tanpa disadari dan dikehendaknya dia menjadi anggota sesuatu masyarakat sukubangsa dan menjadi pendukung serta pemilik kebudayaan sukubangsanya, karena perbuatan orangtuanya, keluarga dan kerabatnya, serta warga masyarakat sukubangsanya.

Sebagai golongan sosial yang askriptif dan primordial, sukubangsa terikat oleh adanya hubungan darah atau kekerabatan dan asal daerah dari para pelakunya. Sehingga secara nyata maka yang kita lihat dari mereka yang tergolong dalam sesuatu sukubangsa adalah orang atau pribadi dan sejumlah orang sebagai satuan-satuan biologi, yaitu keluarga, kelompok kerabat atau *klien*, komuniti dan masyarakat. Sebagai kelompok atau masyarakat maka sebuah

wilayah yang menjadi tempat dari berbagai sumberdaya yang dimanfaatkan oleh anggota-anggota masyarakat sukubangsa setempat untuk kelangsungan hidup mereka. Cara-cara pemanfaatan sumberdaya-sumberdaya yang ada dalam lingkungan mereka itu dilakukan dengan menggunakan kebudayaan yang menjadi pedoman bagi kehidupan mereka. Masing-masing masyarakat sukubangsa, dengan kata lain, mempunyai kebudayaan sendiri yang berbeda dari kebudayaan yang dipunyai oleh masyarakat sukubangsa lainnya. Masing-masing masyarakat sukubangsa tersebut juga mengembangkan pranata-pranata sosial yang berbeda coraknya dari masyarakatnya sukubangsa lainnya. Dalam masyarakat sukubangsa setempat, kebudayaan sukubangsa dari masyarakat tersebut adalah dominan. Dalam sebuah masyarakat yang anggota-anggotanya mencakup lebih dari satu sukubangsa seperti yang terdapat di daerah perkotaan atau di daerah pedesaan dewasa ini di Indonesia, maka ada atau tidaknya adanya kebudayaan sukubangsa yang dominan dan hubungannya antara kebudayaan dari para pendatang dengan kebudayaan dominan mempengaruhi corak hubungan antar-sukubangsa dan potensi konflik antar-sukubangsa.

Profesor Bruner (1974) dalam upaya menjelaskan corak ungkapan kesukubangsaan di daerah perkotaan, yaitu di Bandung dan di Medan, telah

kebudayaan dominan". Inti dari hipotesa ini adalah bahwa corak ungkapan kesukubangsaan di sesuatu masyarakat itu dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya dominasi oleh kebudayaan dari salah satu sukubangsa yang hidup setempat. Di Bandung terdapat kebudayaan Sunda yang dominan, di mana struktur kekuasaan pada tingkat atas sampai dengan tingkat bawah di kota tersebut diperuntukkan bagi dan dipegang oleh orang Sunda. Dalam kehidupan sehari-hari, di tempat-tempat umum, kebudayaan Sunda adalah acuan utama bagi sopan santun dalam tindakan-tindakan, dan bahasa Sunda adalah bahasa yang berlaku di tempat-tempat umum. Para pendatang dari berbagai sukubangsa cenderung menjadi seperti Sunda atau menjadi Sunda (Suparlan 1972, Bruner 1974). Sedangkan di kota Medan yang tidak mengenal adanya kebudayaan sukubangsa dominan, telah menghasilkan adanya masyarakat-masyarakat sukubangsa dengan masing-masing kebudayaan yang relatif otonom dan dominan dalam wilayah tempat tinggal mereka masing-masing. Karena itu di kota Medan, kebudayaan dan bahasa yang digunakan di tempat-tempat umum tergantung pada hasil tawar-menawar kekuatan di antara anggota-anggota sukubangsa yang berbeda-beda. Hal yang sama juga berlaku dalam posisi-posisi yang ada dalam struktur-struktur kekuasaan resmi nasional dan lokal yang ada di kota Medan. Dalam keadaan demikian.

biasanya diaktifkan oleh mereka yang menduduki posisi-posisi kunci, dan karenanya solidaritas sukubangsa menjadi ciri yang menonjol dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan menggunakan model hipotesa kebudayaan dominan dari Bruner seperti tersebut di atas, saya melihat bahwa pada dasarnya kebudayaan Melayu di pantai Barat Kalimantan, terutama di kabupaten Sambas (sekarang menjadi kabupaten Sambas dan kabupaten Bengkayang), adalah kebudayaan dominan. Masyarakat sukubangsa Melayu di Sambas telah mengembangkan pranata politik yang berbentuk kerajaan atau kesultanan, sedangkan masyarakat sukubangsa Dayak yang hidup di daerah pedalaman dan menjadi tetangganya tidak mengembangkannya. Orang Melayu sebagai sukubangsa, mengadopsi agama Islam sebagai agama mereka dan menjadikannya sebagai kebudayaan atau pedoman bagi kehidupan mereka yang menyeluruh. Sebaliknya orang Dayak, adalah sukubangsa yang menganut agama nenek-moyang mereka sebagai pedoman bagi kehidupan mereka. Orang Dayak yang telah mengganti agama nenek-moyangnya menjadi beragama Islam biasanya dinamakan "masuk melayu". Karena agama Islam bagi orang Melayu bukan hanya sekedar pedoman menyeluruh bagi kehidupan mereka sebagai orang Melayu. Pemantapan agama Islam sebagai inti

Melayu yang selama sekian abad memantapkan ajaran-ajaran Islam sebagai bagian dari kebudayaan Melayu. Orang Dayak yang "masuk Melayu" menyadari bahwa mereka bukan hanya harus meninggalkan keyakinan agama asli mereka tetapi juga harus mengadopsi kebudayaan Melayu secara menyeluruh sebagai pedoman bagi kehidupan mereka, walaupun hubungan kekerabatan dengan saudara dan kerabatnya yang Dayak tetap berlangsung. Sedangkan orang Dayak telah beragama Kristen atau Katolik dan yang tinggal dan yang tinggal di daerah pedesaan masih tetap mempertahankan berbagai unsur kebudayaan mereka yang asli, termasuk sebagian dari keyakinan keagamaan mereka, yang secara praktis berguna dalam menghadapi lingkungan yang sebagian besar masih bercorak alami.

Dalam perspektif tersebut di atas, wilayah kabupaten Sambas dapat dilihat sebagai dua wilayah kebudayaan yang berbeda. Di daerah pantai barat terdapat wilayah kebudayaan Melayu yang Islam, yang merupakan kebudayaan sukubangsa dominan yang di masa lampau terpusat di kesultanan Sambas. Sedangkan di daerah pedalaman (yang sekarang menjadi daerah kabupaten Bengkayang), yaitu di bagian timur dari kabupaten Sambas, adalah wilayah dari kebudayaan Dayak yang bercorak egaliter dan yang kebudayaan Dayak tersebut merupakan kebudayaan

menyadari keberadaan dan dominasi kebudayaan sukubangsa di wilayah mereka masing-masing, dan saling menghormatinya. Karena itu hubungan antara dua sukubangsa tersebut berada dalam suatu hubungan yang relatif harmonis dan bercorak simbiotik yang saling menguntungkan. Berbagai sukubangsa pendatang yang menetap di kabupaten Sambas menyadari adanya dua kebudayaan sukubangsa yang dominan tersebut, dan mereka menghormatinya dengan cara hidup dan bertindak di tempat-tempat umum sesuai dengan berbagai pedoman yang berlaku menurut kebudayaan dan pranata-pranatanya, sehingga mereka itu cenderung menjadi seperti Melayu atau seperti Dayak, tergantung pada di mana wilayah tempat kehidupan mereka sebagai pendatang. Orang Bugis, termasuk orang Makasar dan orang Mandar, misalnya, cenderung menjadi seperti orang Melayu dan bahkan menjadi Melayu, seperti orang Jawa di Bandung (Supartan 1972). Kebiasaan orang Bugis untuk menyelipkan badik di pinggang pada waktu berada di tempat-tempat umum dan menggunakannya bila rasa harga diri mereka tersinggung telah tidak dilakukannya lagi di Sambas. Karena mereka merasa bahwa hal itu bertentangan dengan adat Melayu yang berlaku di Sambas. Mereka juga menjadi seperti orang Melayu yang lebih senang menyelesaikan perkara dan persengketaan dengan cara bermusyawarah dan berdamai, dan bila perlu meminta

Dengan mengacu pada kerangka berpikir seperti tersebut di atas, dalam tulisan ini akan saya coba untuk menjelaskan hakikat dari kerusuhan antar-sukubangsa yang berdarah yang terjadi di Sambas (lihat Supartan 1999b dan 1999c) dan menunjukkan bahwa kekerasan yang terwujud adalah produk dari hubungan antar-sukubangsa yang berlaku setempat, dan turut bermainnya para tokoh sukubangsa yang saling konflik. Berbagai sukubangsa pendatang di Sambas telah memperlakukan diri mereka dan orang-orang Melayu atau Dayak sebagai orang perorang. Dan, oleh karena itu maka pada waktu konflik terjadi di antara mereka yang pendatang dengan anggota masyarakat Melayu atau Dayak maka yang terjadi adalah konflik antar perorangan. Sedangkan orang-orang Madura di Sambas selalu menonjolkan kelompok kesukubangsaan Maduranya dan bukan orang perorangannya. Mereka selalu hidup dan bekerja dalam kelompok-kelompok sebagai orang Madura, membangun solidaritas sosial di antara sesama mereka yang Madura, dan bila terjadi persengketaan antara seorang Madura dengan seorang Melayu atau Dayak atau dengan anggota sukubangsa lainnya maka persengketaan tersebut akan selalu diselesaikan oleh kelompok Madura yang bersangkutan. Kesukubangsaan pada orang Madura di Sambas, dalam bentuk kelompok dan solidaritas sosial orang Madura, adalah merupakan acuan utama dari

bagi mereka. Disamping itu, orang-orang dan kelompok-kelompok Madura mempunyai kecenderungan untuk menyelesaikan berbagai masalah dan persengketaan dengan cara ancaman dan kekerasan.

Tanpa disadari oleh semua anggota sukubangsa yang ada di Sambas, dengan cara ancaman dan kekerasan inilah maka secara bertahap kebudayaan dominan Melayu maupun Dayak di tempat-tempat umum di Sambas digeser dan diganti oleh dominasi kekerasan dari kebudayaan Madura. Corak hubungan antara orang Madura dengan orang Melayu dan Dayak di Sambas diwarnai oleh kekerasan, dan kekerasan ini adalah kekerasan kategorikal atau golongan. Sehingga pada waktu terjadi konflik antara Melayu lawan Madura dan Dayak lawan Madura, yang ada adalah konflik antar-golongan askriptif dengan segala atributnya untuk secara kekerasan saling menghancurkan. Konflik-konflik berdarah yang terjadi di Sambas, Ambon, Poso, atau Sampit adalah konflik antar-sukubangsa, dan bukannya konflik komunal sebagaimana yang dinyatakan oleh Aragon dalam menjelaskan kerusuhan Poso (2001), dan dalam tulisan-tulisan pendahuluan buku mengenai akar-akar kekerasan di Indonesia yang edit oleh Colombijn dan Lindblad (2002).

Dari perspektif lain, kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang Melayu dan orang-orang Dayak terhadap semua orang Madura di Sambas

tubuh, dan penghancuran segala atribut yang menempel pada orang Madura adalah sebagai imbas-balik dari upaya pendominasian dengan cara-cara kekerasan oleh orang-orang Madura di Sambas sebelum terjadinya konflik berdarah tersebut. Secara simbolik, pembunuhan, mutilasi tubuh, pengusiran terhadap orang-orang Madura dari Sambas dan penghancuran terhadap rumah-rumah dan segala harta benda orang-orang Madura oleh orang-orang Melayu dan Dayak dapat dilihat sebagai sebuah upaya pembersihan atau pencucian terhadap segala kekotoran atau polusi yang telah menimpa kehidupan mereka di wilayah Sambas yang dikarenakan oleh keberadaan dan perbuatan-perbuatan orang Madura (lihat Douglas, 1966).

Dalam hubungan antar-sukubangsa yang relatif tidak berlangsung secara harmonis seperti yang terjadi antara orang Madura dengan orang Melayu dan dengan orang Dayak di kabupaten Sambas, hubungan antar-pribadi atau antar-perorangan di antara mereka yang harmonis tidaklah berkembang. Yang ada adalah hubungan antar-sterotip yang berupa label yang dihasilkan dari hubungan antar-golongan atau antar-kategori yang tidak menunjukkan adanya ciri-ciri kemanusiaan. Dalam stereotipnya, orang Melayu melihat orang Madura sebagai sama dengan golongan atau kategori hewan yang kotor, yaitu anjing, yang tidak bisa dipercaya, yang pencuri, pemalak, perampok. Sebaliknya, orang Madura melihat

kebanyakan ngomong, kelihatan besar tetapi keropos seperti kerupuk. Sedangkan orang Dayak melihat orang Madura sebagai hewan hama dan hewan buruan yang rakus, yaitu babi hutan. Dan, sebaliknya orang Madura melihat orang Dayak sebagai kafir dan makhluk yang terbelakang (Suparian 1998,1999b). Konflik antar-individu yang menghasilkan kerusuhan antar-sukubangsa dan yang terwujud sebagai kekerasan berdarah sebenarnya dapat juga dipahami dengan mengacu pada stereotip sukubangsa yang mereka punyai masing-masing dan yang mereka gunakan untuk memperlakukan pihak lawan. Kekerasan telah terwujud karena pihak lawan tidak lagi dilihat dan diperlukan sebagai kategori atau golongan manusia tetapi sebagai kategori hewan atau benda atau sesuatu yang kotor yang memang sudah sewajarnya untuk dihancurkan.

Sukubangsa-sukubangsa dengan kebudayaannya masing-masing sudah ada selama berabad-abad dan hidup dari satu generasi demi generasi berikutnya sebelum adanya Indonesia. Indonesia baru ada secara *de jure* dan secara *de facto* karena masyarakat-masyarakat sukubangsa yang ada dalam wilayah jajahan Belanda, yaitu Hindia Belanda, dipersatukan oleh sistem nasional Indonesia melalui proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sistem nasional Indonesia memantapkan keberadaannya dengan melalui

strasinya. Secara umum, sistem nasional Indonesia telah di satu pihak melemahkan kesukubangsaan dari sebagian besar bangsa warga masyarakat Indonesia yang disebabkan oleh besarnya semangat kebangsaan ke-Indonesiaan atau kebangsaan Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Tetapi di lain pihak juga telah memperkuat kesukubangsaan masing-masing warga masyarakat Indonesia karena berbagai pranata yang ada dalam sistem nasional Indonesia telah gagal dalam menyajikan peranan-peranan dan aturan-aturan yang secara adil dan beradab dapat menyelenggarakan upaya-upaya pemenuhan-pemenuhan kebutuhan hidup yang dianggap penting oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat sukubangsa pada umumnya dan masyarakat-masyarakat sukubangsa khususnya.

Pranata-pranata yang ada dalam sistem nasional tidak semuanya berjalan secara sempurna dan efektif dalam memantapkan sistem nasional Indonesia di wilayah-wilayah suku bangsa. Bahkan keberdayaan dan efektifitas dari pranata-pranata yang ada dalam masyarakat-masyarakat sukubangsa telah dibuat tidak berdaya oleh pengaktifan dari pranata-pranata nasional. Di satu pihak pranata-pranata dari masyarakat-masyarakat sukubangsa setempat dilemahkan dan di pihak lain pranata-pranata nasional yang diberlakukan dalam masyarakat

yang menjalankan pranata-pranata tersebut melakukan korupsi.

Di antara berbagai pranata yang dirasakan sebagai tidak efektif atau tidak berfungsi sebagaimana seharusnya adalah pranata-pranata yang menjamin rasa keadilan, perlindungan dari ancaman, dan penegakan hukum untuk rasa aman dan keteraturan sosial. Ini terutama dirasakan oleh warga masyarakat Melayu dan Dayak di Sambas, di mana berbagai aturan yang berlaku di tempat-tempat umum yang semula berdasarkan atas adat atau kebudayaan Melayu atau Dayak telah dilemahkan oleh diberlakukannya pranata-pranata nasional, tetapi pranata-pranata nasional Indonesia tersebut tidak mampu untuk melayani pemenuhan kebutuhan-kebutuhan untuk hidup sejahtera secara adil dan beradab. Bersamaan dengan itu pranata-pranata nasional dilemahkan dan ditunggangi oleh oknum dan kroni-kroni pemerintahan Suharto dengan menggunakan kekerasan dan KKN. Bersamaan dengan itu juga, tempat-tempat umum diambil alih untuk dikuasai oleh kelompok-kelompok preman asal orang madura.

Orang Madura di Kabupaten Sambas

Dari berbagai keterangan yang disampaikan oleh orang-orang Madura, leluhur mereka telah datang dan tinggal di Kalimantan Barat sejak tahun 1920-an. Sebelum Perang Dunia II, keberadaan mereka secara sosial dan ekonomi di Kalimantan Barat tidak

jumlah mereka itu kecil dan karena posisi sosial mereka yang rendah yang pada umumnya adalah buruh kasar dan kuli pembuat jalan. Pada masa sekarang, sebelum terjadinya kerusuhan tahun 1999, orang-orang Madura hidup dihampir wilayah Kabupaten Sambas, yaitu di desa-desa dan di dusun-dusun maupun di daerah perkotaan.

Orang Madura hidup mengelompok di antara sesama orang Madura. Baik yang hidup dalam komuniti-komuniti yang berupa dusun yang secara homogen dihuni oleh orang-orang Madura dan yang terpisah sama sekali dari kehidupan orang-orang Melayu atau Dayak, maupun yang hidup dalam komuniti-komuniti yang ke semua warganya adalah orang Madura yang berada dalam lingkungan wilayah desa orang Melayu atau desa orang Dayak. Dalam keadaan demikian, kampung atau komuniti orang Madura bertetangga dengan komuniti-komuniti Melayu atau Dayak setempat. Di daerah perkotaan, di kota Singkawang misalnya, mereka juga hidup mengelompok dalam lingkungan ketetanggaan yang kesemuanya adalah orang Madura. Pusat dari sebuah komuniti orang Madura adalah tempat ibadah mereka. Pada waktu jumlah mereka itu sedikit maka tempat ibadah tersebut adalah langgar atau musholla. Bila jumlah anggota komunitasnya bertambah banyak maka pusat komunitas tersebut adalah masjid, yang biasanya dibarengi dengan

Madura. Karena bahasa yang digunakan adalah bahasa Madura. Kyai dari komunitas setempat adalah tokoh panutan dunia dan akhirat bagi masing-masing warga komunitas atau masyarakat setempat. Para kyai ini adalah guru ngaji dari anak-anak di masing-masing komunitas Madura, dan imam dalam kegiatan sembahyang berjamaah atau pemimpin upacara keagamaan yang mereka jalankan. Orang-orang Madura hanya bersembahyang berjamaah di masjid Madura, yang khotbahnya dilakukan dalam bahasa Madura.

Menurut orang-orang Melayu, Dayak, Cina, Bugis, Jawa, Batak dan semua anggota sukubangsa yang tinggal di Kabupaten Sambas, baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun yang tinggal di daerah pedesaan, hidup berdampingan dengan orang Madura hanya merugikan saja. Kerugian harta benda atau kehormatan dan harga diri. Orang-orang Melayu merasa bahwa orang-orang Madura tidak menghargai harkat martabat mereka sebagai manusia dan sebagai penduduk setempat dan orang Madura juga tidak memandang sebelah mata kepada adat istiadat Melayu yang mereka junjung tinggi. Orang-orang Madura telah memperoleh keuntungan secara berlebihan (tanah pertanian dan kebun, rumah, monopoli kegiatan berjualan dan bisnis, monopoli eksplorasi batu dan penambangan emas, kayu dan berbagai hasil hutan lainnya), dengan cara curang

berupa teror mental dan penyiksaan serta pembunuhan. Orang-orang Madura tidak pernah merasa bersalah terhadap warga masyarakat setempat yang dirugikannya secara curang walaupun perbuatan tersebut secara etika dan moral yang berlaku setempat maupun secara umum adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum.

Warga masyarakat setempat yang berasal dari berbagai sukubangsa dan lapisan sosial di Kabupaten Sambas melihat orang-orang Madura sebagai pencuri, perampok, dan preman atau tukang palak. Waktu saya katakan kepada mereka dalam diskusi-diskusi di kota Sambas, Tebas, Pemangkat dan di ibukota Kecamatan Jawai maupun secara pribadi dalam berbagai wawancara, bahwa orang-orang Madura yang pencuri, perampok, dan preman atau tukang palak itu tidak semua orang Madura di Sambas, mereka semuanya membantah pernyataan saya. Yang menarik untuk diperhatikan adalah bahwa orang-orang Melayu tersebut memberikan contoh berdasarkan pengalaman masing-masing dan yang dibenarkan oleh lainnya, mengenai bagaimana mereka itu telah dirugikan oleh orang-orang Madura. Bahkan mereka mengatakan bahwa *boss-boss* para preman adalah para Kyai yang tokoh masyarakat Madura setempat atau mereka yang bergelar haji dan kaya.

Menurut mereka, luas tanah dari kebun dan sawah serta pekarangan atau halaman rumah mereka bisa

dari waktu ke waktu karena pagar atau batas tanah, yang berupa pagar hidup, digeser dari waktu ke waktu si tetangga yang Madura. Begitu juga padi di sawah, palawija, buah-buahan di pohon adalah mereka yang menanam tetapi yang memetik hasilnya adalah orang Madura. Mereka tidak berani untuk melarangnya karena takut diparang. Ayam dan itik tidak sempat bertelur, kata mereka, karena hilang dari kandang pada waktu binatang-binatang tersebut sudah menjadi besar, dan berbagai contoh lainnya yang amat banyak untuk disebutkan satu persatu. Selanjutnya mereka menunjukkan kasus-kasus monopoli pelayanan transportasi di kota Sambas dan Singkawang misalnya, yang telah dilakukan dengan ancaman terhadap orang-orang yang bukan Madura yang melakukan kegiatan pelayanan transportasi. Ancaman tersebut bertujuan agar mereka yang bukan Madura meninggalkan kegiatan mereka itu. Juga pemalakan terhadap supir-supir angkutan umum yang bukan orang Madura, pemalakan atas usaha dagang dan bisnis, dan pemalakan terhadap warung-warung atau toko-toko dan berbagai kegiatan pencurian dan pemerasan yang dilakukan oleh orang-orang Madura.

Orang-orang Madura, tua dan muda, laki-laki dan perempuan, selalu menyelipkan sebilah pisau atau badik di pinggang mereka pada waktu mereka itu berada di tempat-tempat

ada di pinggang mereka dengan tujuan untuk menakut-nakuti warga masyarakat yang ada di tempat-tempat umum atau pasar. Walaupun sudah ada larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten sambas setelah peristiwa kerusuhan Dayak-Madura di Sanggo Ledo pada tahun 1996-1997, tetapi tetap saja orang-orang Madura di Kabupaten Sambas selalu membawa senjata tajam di tempat-tempat umum. Alasan mereka adalah bahwa pisau atau badik tersebut berfungsi sebagai pengganti tulang rusuk ke tujuh, yang hanya ada enam buah. Orang-orang Madura selalu dengan sigap mencabut badik atau parang yang ada di pinggang mereka untuk menyelesaikan berbagai persengketaan yang mereka hadapi.

Oleh warga masyarakat setempat yang berasal dari berbagai suku-bangsa, orang-orang Madura dikenal sebagai sebuah kelompok sukubangsa yang kuat solidaritas sosial di antara sesamanya dalam menghadapi orang luar yang bukan orang Madura. Menurut mereka, bila seorang Madura mengalami kesulitan karena yang bersangkutan bertengkar dengan warga setempat yang menjadi tetangganya maka orang-orang Madura lainnya yang menjadi sesama warga komunitasnya akan membelanya sehingga orang Madura yang bersangkutan tersebut memenangkan pertengkaran atau konflik yang terjadi. Mereka tidak peduli apakah orang Madura yang bertengkar tersebut

dimenangkan. Bahkan menurut seorang petugas kepolisian di Tebas, mereka juga pernah menyerang sebuah Pos Polisi di Tebas dan kantor Polsek Tebas. Bahkan di Pontianak, ibukota Kalimantan Barat, orang-orang Madura pernah menyerang kantor Polres. Orang-orang yang bukan Madura di kabupaten Sambas memperoleh kesan bahwa orang-orang Madura itu mempunyai prinsip satu untuk semua dan semua untuk satu. Prinsip tersebut telah digunakan oleh orang-orang Madura dalam upaya mereka untuk mendominasi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Kabupaten Sambas dan di Kalimantan Barat pada umumnya. Pendominasian tersebut telah dilakukan oleh orang-orang Madura dengan cara-cara kekerasan dan kecurangan yang bertentangan dengan adat istiadat Melayu maupun adat istiadat Dayak yang berlaku setempat.

Orang-orang Melayu yang tidak terbiasa hidup dengan cara-cara kekerasan dalam memenangkan sesuatu persaingan menjadi ketakutan, dan lebih-lebih lagi dengan cara kekerasan yang curang (menurut orang-orang Melayu, orang Madura selalu menclurit pada waktu si orang Melayu dalam keadaan lengah). Selama sekian puluh tahun dan sekian generasi orang-orang Melayu menekan rasa ketakutan dan frustrasi dengan harapan bahwa penegak hukum akan dapat mengatasi ketidakadilan tersebut. Tetapi harapan mereka ternyata tidak pernah

orang-orang Melayu yang saya wawancarai, orang-orang Madura semakin merajalela yang membuat orang-orang Melayu dan mereka yang tergolong bukan orang Madura menjadi semakin ketakutan. Orang-orang Melayu memang takut menghadapi orang-orang Madura yang biasa menggunakan cara-cara kekerasan yang dilakukan secara curang. Mereka biasa melakukan cara-cara pengeroyokan dan melukai lawan atau korbannya dengan senjata tajam. Pada dasarnya orang-orang Melayu adalah individualis-individualis yang tidak mengenal adanya solidaritas sukubangsa, seperti yang menjadi ciri-ciri dari orang Madura. Karena itu, dalam menghadapi orang-orang Madura di dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka itu berada dalam posisi orang-perorang atau sendirian yang dihadapkan pada sebuah kelompok orang Madura yang bersenjata yang biasa menggunakan senjatanya dan mempunyai kemampuan untuk menghancurkan si Melayu. Orang-orang Melayu juga mengaku bahwa dalam berargumentasi mengenai sesuatu kebenaran dengan orang-orang Madura mempunyai acuan logika yang aneh dan kokoh atau dipertahankan secara keras kepala.

Salah seorang dari orang-orang Melayu di Pemangkat yang saya wawancarai menunjukkan contoh bahwa, pada waktu dia menegur seseorang tetangganya yang mengambil buah kelapa dalam jumlah

tumbuh di pekarangan rumahnya, si tetangga Madura tersebut mengatakan bahwa dia telah diberi ijin olehnya kemarin untuk mengambil buah kelapa yang dimilikinya. Si orang Melayu tersebut mengatakan: *"Itu kan kemarin, dan saya memberikan ijin untuk mengambil satu atau dua buah kelapa untuk memasak lauk di rumah, dan bukannya untuk diambil dalam jumlah banyak untuk dijual ke pasar"*.

Si orang Madura tersebut mengatakan: *"Ijinnya tidak mengatakan kelapa yang saya ambil itu untuk masak atau untuk keperluan lainnya, dan juga tidak dikatakan berapa buah kelapa yang bisa saya ambil. Ijin sudah kamu berikan kepada saya, apa kamu mau mengingkari ijin yang telah kamu berikan? Saya minta ganti rugi kalau tidak kamu ijin, atau kamu akan saya sakiti kalau tidak diberi ganti rugi"*

Sambil berkata-kata tersebut si tetangga Madura memegang gagang parangnya. Menurut cerita si orang Melayu selanjutnya, selama enam bulan si tetangga Madura tersebut mengurus habis buah kelapa di pohon-pohon kelapa yang dimilikinya, tanpa dia mampu menolaknya. Akhirnya si orang Melayu dan keluarganya memutuskan untuk pindah ke Pontianak. Contoh lain adalah cerita seorang dosen Universitas Tanjung Pura, Pontianak, yang pulang ke rumah mendapati seorang Madura sedang memetik buah-buah jambu yang di pohon halaman rumahnya. Dia bertanya: *"kamu mencuri buah-buah jambu saya, ya?"* Si orang Madura tersebut dengan tenang menjawab:

"Saya tidak mencuri. Mencuri itu dilakukan pada malam hari, dan itu dosa. Saya hanya mengambil buah jambu".

Kerusuhan Sambas dan Pemicunya

Frustasi sosial yang meluas dan mendalam karena merasa bahwa kehidupan mereka itu didominasi secara curang dan sewenang-wenang dan dengan cara kekerasan oleh orang Madura telah membuat orang Melayu hanya mampu menggerutu dan mengeluh. Tidak seorangpun di antara mereka, sebelum kerusuhan Melayu-Madura itu terjadi, yang berani menantang dominasi tersebut. Mereka hanya dapat ikut bersorak sorai di dalam hati pada waktu terjadi kerusuhan Dayak-Madura di Sanggo Ledo pada tahun 1996-1997, di mana orang-orang Madura yang terbunuh cukup banyak jumlahnya. Kebudayaan dan kesukubangsaan orang Dayak berbeda dari yang dipunyai oleh orang Melayu. Kebudayaan orang Dayak juga mirip dengan kebudayaan orang Madura. Orang Dayak mampu untuk melawan kekerasan orang Madura dengan kekerasan dan mampu untuk melawan kekejaman dengan kekejaman yang sama atau bahkan lebih kejam daripada yang telah dilakukan orang-orang Madura.

Menurut sejumlah tokoh Dayak dan tokoh Madura yang saya jumpai di Singkawang pada tahun 1999, antara tahun 1962-1999 telah terjadi kerusuhan berdarah sebanyak 11 kali. Kerusuhan dengan banyaknya korban

hancur yang diderita oleh kedua belah pihak adalah kerusuhan yang terjadi pada tahun 1996-1997 (lihat Parsudi 1998). Pada setiap konflik berdarah antara Dayak-Madura yang telah terjadi selama 11 kali tersebut, konflik selalu dihentikan dengan sebuah upacara perjanjian damai yang diwakili oleh para tokoh dari masing-masing pihak. Tetapi setiap perjanjian perdamaian Dayak-Madura yang telah dibuat sebanyak 11 kali tersebut selalu dilanggar oleh orang Madura yang dengan secara khilaf melukai atau membunuh orang Dayak dalam sesuatu persengketaan.

Orang Madura yang berani mati bukan hanya karena memang berani mati yang dikarenakan mempunyai prinsip 'harga nyawa cuma sebenggol', tetapi juga karena mereka itu percaya pada doa dan jimat atau *isim* yang telah diberikan oleh para kyai atau guru mereka. Sedangkan orang Dayak memperoleh kekuatan dan keberanian dari roh-roh panglima perang yang menjadi nenek-moyang mereka yang dapat dipanggil sewaktu-waktu untuk melindungi dan mempertahankan ketentraman kehidupan mereka. Untuk itu mereka harus melakukan upacara keagamaan yang dinamakan *matok* untuk memanggil tokoh panglima perang tersebut, yang dinamakan *kamang taru* di mana kata *taru* sebenarnya berarti teriakan, yaitu teriakan perang yang menggetarkan seluruh sendi tulang musuh yang mendengarnya, untuk merasuk

anak-anak cucu dari *kamang taru* atau panglima perang. Dalam upacara tersebut persyaratan utama adalah menyembelih ayam jantan berbulu merah dan anjing berbulu merah untuk orang-orang Dayak Sungkung, Bengkayang, Selamantan, dan Seluas. Sedangkan untuk orang-orang Dayak di Jawai, Tebas, Pemangkat, Paloh dan sekitarnya yang disembelih adalah ayam jantan berbulu hitam dan anjing yang juga berbulu hitam. Darah hewan tersebut ini ditampung di sebuah mangkuk, sehingga mangkuk yang semula putih itu menjadi berwarna merah. Mangkuk berwarna merah dengan darah atau dikenal dengan nama 'mangkuk merah' inilah tanda bahwa orang Dayak sudah siap untuk berperang. Orang-orang Dayak yang berpartisipasi dalam upacara tersebut melantunkan doa-doa dan menari-nari dan menjilat darah dalam mangkuk atau menghirup baunya, yang dengan cara itu dipercaya bahwa *kamang taru* telah merasuk ke dalam tubuh mereka masing-masing. 'Mangkuk Merah' ini kemudian diedarkan kepada orang-orang Dayak lainnya yang tinggal di komuniti yang bersangkutan maupun yang tinggal di komuniti-komuniti lainnya yang tersebar di wilayah kabupaten Sambas. Pengedaran 'mangkuk merah' ke komuniti-komuniti Dayak di daerah pedesaan yang luas adalah dimaksudkan bahwa peperangan telah siap untuk dijalankan dan solidaritas Dayak diminta untuk diwujudkan dalam bentuk partisipasi mereka di dalam kancah peperangan.

berakhir, seperti yang terjadi antara orang Dayak melawan Madura, maka roh *kamang tariu* atau panglima perang itu harus dikembalikan ke tempat peristirahatannya yang semula. Untuk itu perlu diadakan upacara lagi yang biayanya lebih mahal daripada upacara memanggil *kamang tariu*. Menurut keterangan seorang tokoh Dayak yang tinggal di Singkawang upacara pengembalian roh-roh *kamang tariu* itu harus dilakukan agar para roh tersebut tidak mengganggu kehidupan sehari-hari orang Dayak yang mencintai kehidupan dan kedamaian dengan sesama baik yang terlihat maupun yang tidak dan baik dengan manusia maupun dengan sesama makhluk lainnya.

Berbeda dengan konflik antara orang Dayak dengan orang Madura yang telah terjadi sebanyak 11 kali, maka konflik berdarah antara orang Melayu dengan orang Madura hanya terjadi sekali yang berlangsung secara besar-besaran dan menyeluruh serta habis-habisan. Kesan saya, dari kerusuhan-kerusuhan yang terjadi, yang sempat saya amati di wilayah Sungai Raya, adalah seperti mengamuknya tokoh *Hang Jebat* dalam cerita *Hikayat Hang Tuah*. Orang-orang Melayu yang biasanya lemah lembut budi pekerti serta tutur spanya dan penakut, telah berubah menjadi beringas dalam kelompok-kelompok amuk massa yang tidak dapat dibendung atau dikendalikan lagi dalam upaya untuk menghancurkan orang-orang Madura dan segala

Keberingasan orang-orang Melayu, khususnya para pemuda dan remaja, telah dipicu oleh peristiwa "Parit Setia" dan oleh sejumlah peristiwa yang sama yang berturut-turut terjadi setelah itu.

Pada tanggal 19 Januari 1999, tepat pada hari raya Idul Fitri, warga masyarakat Desa Parit Setia, Kecamatan Jawai, diserang oleh kira-kira 200 orang Madura dari Desa Sarimakmur, Kecamatan Tebas yang bertetangga dengan Kecamatan Jawai. Tiga orang penduduk Desa Parit Setia dibunuh dan sejumlah lainnya luka-luka. Dua orang polisi yang menghadang orang-orang Madura tersebut dibuat tidak berdaya dan semua senjata mereka dirampas. Peristiwa "Parit Setia" tersebut bermula dari peristiwa yang telah terjadi sebelumnya, yaitu pada tanggal 17 Januari 1999, dimana seorang pencuri asal Madura dari Desa Sarimakmur, Kecamatan Tebas, tertangkap oleh tuan rumah pada waktu sedang mengumpulkan barang-barang di rumah dari penduduk setempat setelah membongkar pintu rumah tersebut. Pencuri sial tersebut dikeroyok, ditangkap, dan dipukuli sampai babak belur oleh tuan rumah yang kecurian dan oleh para tetangganya. Pada pagi harinya, tanggal 18 Januari 1999, pencuri tersebut diserahkan kepada Pos Polisi setempat. Petugas kepolisian di Pos Polisi membawa si pencuri ke puskesmas untuk diobati luka-lukanya, dan setelah itu diantar ke rumah

tidak berani menanggung resiko kalau Pos Polisi diserang dan dihancurkan oleh orang-orang Madura lainnya.

Apa yang menyakitkan hati orang-orang Melayu dari peristiwa penyerangan di desa Parit Setia oleh orang-orang Madura dari Desa Sarimakmur adalah teriakan 'Allah Hu Akbar' berkali-kali yang dikumandangkan oleh para penyerang tersebut. Teriakan 'Allah Hu Akbar' ini dibarengi dengan teriakan-teriakan ejekan 'Melayu Kerupuk' dan 'Melayu kalah 3-0 (artinya orang Melayu di desa Parit Setia meninggal 3 orang dan tidak satupun orang Madura yang meninggal ataupun terluka dalam penyerangan tersebut). Teriakan-teriakan ini terdengar dengan jelas oleh orang Melayu warga Desa Parit Setia yang bersembunyi di semak-semak belukar di desa itu dan menyaksikan pawai kemenangan orang Madura yang berkendara truk dan berkeliling desa. Para pemuda Melayu dari desa-desa di kecamatan Jawai menjadi resah dan bersiap-siap untuk menyerang Desa Sarimakmur, dan menghancurkan rumah-rumah orang Madura. Berkat hambatan dan cegahan dari orang-orang tua mereka, maka upaya para pemuda dan remaja Melayu itu dapat digagalkan. Pada tanggal 23 Januari 1999 berkat bantuan dari para pejabat di Kabupaten Sambas dan tokoh-tokoh Melayu, para tokoh masyarakat Desa Parit setia dan Desa Sarimakmur dipertemukan dan diadakan

telah menjadi reda berkat perjanjian perdamaian tersebut, walaupun orang-orang Melayu masih memendam rasa sakit hati karena tidak sepele kata 'minta maaf' yang dilontarkan oleh pihak orang Madura atas kematian dan luka-luka yang diderita oleh warga Desa Parit Setia.

Sebelum diadakannya perjanjian damai seperti tersebut di atas, di tempat terpisah, pada tanggal 21 Januari seorang preman Madura yang naik kendaraan umum dari kota Singkawang ke arah kota Sambas tidak mau membayar biaya angkutan pada waktu dia berhenti di dekat desa Semparuk. Merasa sakit hati karena dipelototi oleh kenek dan supir yang orang Melayu, si preman Madura tersebut pulang ke rumah mengambil clurit. Dengan berbekal clurit dia menghadang kendaraan umum tersebut yang kembali ke arah kota Singkawang, menyuruh kendaraan tersebut berhenti dan menclurit si kenek. Pada jam 01.00 tanggal 22 Januari 1999, keesokan harinya, orang-orang Melayu di desa Semparuk yang sebagian besar adalah para pemuda dan remaja menyerang rumah si preman Madura yang bernama Rodi bin Muharap. Tetapi Rodi bin Muharap tidak ditemukan dan sebaliknya seorang pemuda Melayu meninggal dunia karena ditembak dengan menggunakan senjata lantak oleh orang-orang Madura teman Rodi. Persitiwa kematian pemuda Melayu tersebut membakar kemarahan para pemuda dan remaja Melayu yang

oleh orang-orang tua mereka. Pada jam 02.00 pagi hari itu juga mereka menyerang dan membakar serta menghancurkan rumah-rumah dan ruko-ruko milik orang madura yang ada di desa-desa dan pinggiran kota di wilayah kecamatan Tebas, Pemangkat, dan Jawai. Sejumlah orang Madura meninggal dunia dan luka-luka, dan tercatat 60 buah bangunan rumah dan ruko yang dihancurkan. Kegiatan untuk menghancurkan orang-orang Madura dan rumah-rumah serta harta benda mereka berlangsung terus sampai tanggal 27 Februari 1999.

Pada tanggal 27 Februari 1999 penyerangan orang-orang Melayu terhadap orang-orang Madura dihentikan atas perintah para orang tua dan tokoh-tokoh Melayu di Sambas, karena pada hari itu ditandatangani perjanjian perdamaian orang Melayu-orang Madura oleh para tokoh dari kedua belah pihak dengan disaksikan oleh pimpinan dan para pejabat kabupaten Sambas. Tokoh-tokoh dari kedua belah pihak juga sepakat untuk masing-masing secara individual tidak membawa senjata tajam di tempat-tempat umum. Tetapi perjanjian tersebut dilanggar oleh seorang pemuda asal desa Sempadung yang pada tanggal 14 Maret 1999 menikam seorang pemuda Melayu yang menegurnya karena membawa parang secara terbuka di jalan umum. Hari itu juga orang-orang Melayu mengambil tekad tidak akan lagi berdamai dengan orang-orang Madura. Sejak saat itu juga perang

orang-orang Madura berlangsung di desa-desa dan di kota-kota dalam wilayah kabupaten Sambas. Kalau sebelum peristiwa ini orang-orang Madura yang menyerang orang-orang Melayu yang ketakutan, maka keadaannya sekarang menjadi terbalik. Kampung-kampung orang Madura di kota Singkawang dan di desa-desa yang tercakup dalam tiga kecamatan di bagian selatan dari kota Singkawang secara relatif masih aman karena belum diserang habis-habisan oleh orang-orang Melayu sampai dengan minggu ke-empat bulan April 1999. Sedangkan di wilayah timur dan utara kabupaten Sambas keadaannya dapat dikatakan sudah tidak ada lagi orang Madura dan rumah serta harta milik mereka yang utuh. Orang-orang Madura tersebut dengan cepat diungsikan dengan pengawalan ketat oleh para petugas keamanan untuk menghindari jumlah korban yang lebih besar daripada yang sudah ada.

Kerusuhan berdarah antara orang Melayu dengan orang Dayak nampaknya tidak cukup bagi orang Madura. Karena mereka itu masih mencari musuh lainnya, yaitu orang Dayak yang telah menjadi musuh bebuyutan mereka. Pada tanggal 16 Maret 1999, pukul 15.00 waktu setempat, di dusun Parakan Tanjung (yang merupakan dusun yang komunitinya secara homogen terdiri atas orang-orang Madura), dari desa Harapan, kecamatan Pemangkat, sekelompok orang Madura mencegat sebuah kendaraan umum yang

tersebut. Kendaraan umum tersebut dalam perjalanan mengangkut buruh dan pekerja dari daerah kecamatan kota Sambas ke arah kota Singkawang. Dalam kendaraan umum terdapat 2 orang Melayu, 3 orang Jawa, dan 26 orang Dayak. Ke semua penumpang dapat melarikan diri dan bersembunyi di semak dan belukar di tepi hutan dan kemudian diselamatkan oleh orang-orang Melayu di desa Melayu yang berdekatan, kecuali satu orang Dayak yang dapat ditangkap oleh orang-orang Madura tersebut, Martinus Amat bin Paran, adalah warga desa Selawit, kecamatan Salamantan, yang terletak di sebelah timur kota Singkawang.

Kematian Martinus telah menyebabkan keluarga dan orang-orang Dayak melakukan upacara *Matok* dan mengedarkan 'mangkuk merah' ke komuniti-komuniti Dayak lainnya di kabupaten Sambas. Penyerangan terhadap orang-orang Madura sekarang ini tidak lagi hanya dilakukan oleh orang-orang Melayu tetapi juga oleh orang-orang Dayak dengan cara-cara seperti pada waktu masih berlakunya *pengayauan*, dengan cara-cara pemenggalan kepala dan mutilasi tubuh serta kanibalisme. Situasi masyarakat kabupaten Sambas betul-betul rusuh. Petugas keamanan dari Polri dan Brimob serta dari PHH (Pasukan Anti Huru Hara dari ABRI) tidak mampu untuk mengatasi kerusuhan dan pembunuhan serta pembakaran dan penghancuran rumah-rumah orang Madura. Orang-

Singkawang, yaitu di daerah Bengkayang dan sekitarnya, habis dibunuh oleh orang-orang Dayak atau lari mengungsi ke tempat-tempat penampungan pengungsian dan berada di bawah perlindungan petugas keamanan. Setiap hari pada waktu itu selalu terdengar berita dibunuh atau dilukainya orang-orang Madura serta pembakaran rumah dan harta benda mereka. Korban yang terbunuh dan luka-luka bukan hanya orang Madura tetapi juga orang-orang Melayu dan Dayak walaupun jumlahnya relatif sedikit. Jumlah pengungsi Madura yang tercatat di tempat-tempat penampungan pengungsi di Pontianak dan di kota Singkawang ada 37.000 orang. Orang-orang Melayu dan Dayak di kabupaten Singkawang telah bertekad untuk menghancurkan atau mengusir orang Madura dan berbagai atributnya dari wilayah kabupaten Sambas. Cara-cara yang mereka lakukan adalah dengan kekerasan, karena menurut mereka orang-orang Madura hanya mengerti bahasa kekerasan. Karena situasinya yang rusuh ini, Kapolda Kalimantan Barat pada bulan April 1999 mengeluarkan perintah tembak di tempat bagi para perusuh dan menangkap siapa saja yang kedapatan membawa senjata tajam di tempat-tempat umum.

Dalam tulisan ini patut dikemukakan bahwa peranan tokoh-tokoh politik dan bisnis dari masing-masing kelompok sukubangsa dalam konflik berdarah di wilayah kabupaten Sambas tidaklah kecil artinya. Pertemuan-pertemuan di

dalam masing-masing kecamatan di kabupaten Sambas diadakan untuk membahas konflik-konflik yang sedang berlangsung dengan orang Madura di wilayah kecamatan mereka masing-masing. Pertemuan dengan Sultan Sambas yang mereka anggap sebagai tokoh utama di wilayah kabupaten Sambas diadakan beberapa kali. Melalui pertemuan-pertemuan itu, secara bertahap diputuskan untuk menghancurkan dan mengusirkan orang-orang Madura dari wilayah kabupaten Sambas dan membuat alasan-alasan yang masuk akal mengenai keputusan mereka. Mereka menyatakan secara bulat bahwa Sambas adalah wilayah Melayu. Menurut mereka keputusan tersebut sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Saya dan anggota Tim Penelitian berkesempatan untuk hadir dalam salah satu pertemuan yang diadakan di istana Kesultanan Sambas. Kami merasakan semangat anti-Madura yang meledak-ledak dalam pertemuan tersebut.

Bahkan, selama konflik berdarah itu berlangsung di Sambas, Kesultanan Sambas mengeluarkan jimat atau *isim*, walaupun secara tidak resmi dikeluarkannya, yang berupa kertas-kertas berisikan cuplikan doa dari Al-quran. Di antara doa-doa tersebut adalah surat *Al-Fatihah*. Sebagian dari jimat atau *isim* tersebut bergambar photo Bung Karno dan photo Sultan Sambas yang terdahulu, yang biasa disebut "Sultan Tua" jimat atau isim ini dapat

atau di pasar dengan harga yang terjangkau. Menurut pengakuan yang membeli, jimat atau *isim* tersebut dapat digunakan untuk melindungi diri dari serangan orang Madura. Biasanya ditempelkan di bagian atas dan di dinding dalam pintu rumah bagian muka, atau di taruh di kantung baju.

Tokoh-tokoh Melayu di Pontianak, terutama yang berasal dari wilayah kabupaten Sambas, juga mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membahas konflik-konflik Melayu-Dayak yang sedang berlangsung dan untuk mengatur strategi dalam membantu saudara-saudara dan kerabat-kerabat mereka di wilayah kabupaten Sambas dalam mengalahkan dan mengusir orang-orang Madura dari wilayah kabupaten Sambas. Hal yang sama juga dilakukan oleh tokoh-tokoh Madura dan Pontianak yang dipimpin oleh H. Solaeman. Di Surabaya dilakukan di bawah kepemimpinan mantan Bupati Moh. Nur yang dilakukan kampanye untuk menyelamatkan orang-orang Madura. Di Jakarta kampanye yang sama juga dilakukan oleh tokoh-tokoh Madura, termasuk Didiek Rachbini yang menyatakan bahwa di Kalimantan Barat yang telah terjadi Nazisme. Apa yang dinyatakan oleh Rachbini tersebar secara luas beredar di media massa termasuk media elektronika di tahun 1999. *)

Kesimpulan

Dalam tulisan ini telah saya

sukubangsa di wilayah kabupaten Sambas adalah produk hubungan antar-sukubangsa yang berlangsung di wilayah kabupaten Sambas yang coraknya sangat tidak harmonis antara orang Melayu dengan orang Madura dan antara orang Dayak dengan orang Madura. Walaupun corak hubungan antar-sukubangsa di wilayah-wilayah kabupaten di Kalimantan Barat antara orang Madura dengan kelompok-kelompok sukubangsa lainnya juga tidak harmonis, tetapi corak hubungan tersebut tidak separah yang berlangsung di wilayah kabupaten Sambas. Sehingga konflik berdarah antara orang-orang Melayu dan Dayak di satu pihak dengan Madura di pihak lain hanya terbatas di wilayah kabupaten dan dengan tidak terlalu sukar dapat dibendung oleh pemerintahan setempat dan pranata keamanannya hanya berlangsung di wilayah kabupaten Sambas. Kerusuhan Sambas, yaitu konflik antara sukubangsa Melayu dan Dayak di satu pihak dengan sukubangsa Madura di pihak lain pada tahun 1999, telah terjadi karena dipicu oleh perampasan dan penumpasan hak-hak budaya yang secara tradisional berlaku di wilayah kebudayaan Melayu dan Dayak di kabupaten Sambas. Dalam konflik berdarah tersebut tokoh-tokoh dari masing-masing sukubangsa turut bermain, karena kepentingan-kepentingan politik dan bisnis.

Penumpasan hak-hak budaya yang dilakukan dengan menggunakan cara-cara kekerasan dan kecurangan. Dan

pendominasian dilakukan oleh orang-orang Madura melalui kegiatan premanismenya di berbagai tempat umum di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan di kabupaten Sambas. Corak hubungan antar-sukubangsa yang berkembang antara sukubangsa Melayu dan Dayak di satu pihak dengan sukubangsa Madura adalah hubungan kategorikal atau hubungan golongan yang menjadi landasan bagi berkembang dan mantapnya stereotip-stereotip mengenai masing-masing pihak. Sedangkan hubungan sosial atau hubungan personal di antara mereka hampir dapat dikatakan sangat kecil. Sehingga, pada waktu terjadi konflik antara orang Melayu dan Dayak di satu pihak dengan orang Madura di pihak lain di tahun 1999, maka yang terjadi adalah konflik berdarah karena masing-masing tidak melihat pihak lawan sebagai manusia tetapi sebagai golongan yaitu golongan hewan atau benda sesuai dengan stereotip yang berkembang dan mantap mengenai masing-masing pihak lainnya. Bahkan agama Islam, yang sama-sama diyakini sebagai keyakinan keagamaan oleh orang-orang Melayu dan orang Madura tidak berfungsi sebagai landasan bagi pengikat kebersamaan mereka dalam satu kategori sosial, yaitu muslim yang dapat diaktifkan untuk mempersatukan perbedaan dan pertentangan kepentingan mereka dalam perebutan sumber-sumber daya di kabupaten Sambas.

Patut dicatat bahwa orang Madura

mereka dalam lingkungan komunitas mereka sendiri dan melakukan upacara-upacara keagamaan yang hanya berlaku bagi mereka yang orang Madura, karena bahasa pengantarnya adalah bahasa Madura. Agama Islam bagi orang Madura di Sambas adalah agama Islam lokal yang Madura, yang dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan-perbedaan sehingga upacara-upacara keagamaan adalah nampak eksklusif karena tidak dapat diikuti oleh orang Melayu atau yang bukan Madura. Karena itu, upaya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Madura pada tahun 1996-1997 untuk melibatkan orang-orang Madura yang Islam ke dalam keadaan konflik berdarah antara orang Madura dengan orang Dayak dengan cara mengaktifkan isu sebagai perang antara Islam-Kristen telah gagal. Tokoh Melayu tidak melihat konflik di tahun 1996-1997 antara Madura-Dayak sebagai konflik keagamaan, tetapi sebagai konflik antara kebrutalan Madura melawan orang Dayak yang membe-rontak terhadap kebrutalan tersebut. Dalam pertemuan saya dengan para tokoh Madura di Singkawang pada tahun 1998, yang antara lain juga dihadiri oleh H. Solaeman dari Pontianak mereka mengatakan bahwa konflik Dayak-Madura yang telah terjadi adalah konflik antara Islam-Kristen. Kesemuanya ini dipicu oleh provokasi dari upaya kristenisasi yang dilakukan oleh para pastur, dan sasarannya adalah orang Madura yang merupakan *mujahidin* dan

ini tidak tahu dan tidak mengerti mengapa orang Melayu tidak mau ikut memerangi orang Dayak yang kristen. Mereka ini tidak tahu isi hati para tokoh Melayu yang memendam rasa sakit hati terhadap orang-orang Madura, dan tokoh-tokoh Madura ini juga tidak tahu bahwa hubungan antara orang Melayu dan orang Dayak bukanlah hubungan antar keyakinan keagamaan yang berbeda.

Sama dengan konflik berdarah yang terjadi di Ambon, Sampit dan Poso. Konflik berdarah di Sambas juga dimulai oleh perbuatan premanisme dan kesewenang-wenangan oleh sebuah kelompok terhadap kelompok atau kelompok-kelompok sukubangsa lainnya. Perbuatan premanisme dan kesewenang-wenangan yang dilakukan dengan cara mengaktifkan primordialisme, yaitu kesukubangsaan dan/atau keyakinan keagamaan. Pengaktifan kategori atau golongan askriptif ini menyulut respon atau tanggapan dari pihak lawan dengan juga mengaktifkan golongan askriptifnya untuk membangun kohesi sosial di antara sesama sukubangsa atau keseyakinan keagamaan (dalam kasus di Ambon dan di Poso, tidak berlaku dalam kasus di Sambas maupun di Sampit) untuk solidaritas sosial dalam mengalahkan pihak lawan. Pada waktu sebuah konflik antara sukubangsa berkembang menjadi sebuah konflik berdarah seperti yang terjadi di Sambas, maka konflik berdarah tersebut sudah bukan lagi berkaitan dengan atau disebabkan

daya, tetapi sudah bergeser menjadi isu yang terfokus pada kehormatan jati diri sukubangsa atau kehormatan kesukubangsaan. Kesukubangsaan yang kehormatannya tercoreng harus dibangun kembali. Dan pembangunan kembali kehormatan kesukubangsaan harus dilakukan dengan kepahlawanan yang pada dasarnya adalah kekerasan terhadap pihak lawan yang dianggap telah mencoreng kehormatan tersebut. Itulah sebabnya mengapa dalam konflik berdarah antar-sukubangsa yang telah dan sedang meletus tidak mungkin didamaikan atau dicegah dengan cara damai. Karena sekali sebuah kekerasan dilakukan dan bergulir maka kekerasan tersebut semakin menjadi besar dan meluas sehingga tidak mungkin dihentikan dengan cara persuasif atau damai. Bila sesuatu kekerasan yang dilakukan oleh satu pihak untuk mengembalikan kehormatan itu baru dimulai bila puncak kemenangan telah dicapai sehingga pihak yang bersangkutan tidak merasa perlu untuk melanjutkannya lagi maka tindakan-tindakan kekerasan tersebut dapat dihentikan secara persuasif atau damai. Sedangkan dalam keadaan di luar dua kondisi tersebut maka kekerasan hanya dapat dihentikan atau dikurangi dengan cara kekerasan juga, yaitu oleh pihak ketiga yang netral atau petugas keamanan.

Kesewenang-wenangan orang Madura terutama kelompok-kelompok premanya di kabupaten Sambas tidaklah akan terjadi bila dalam

terdapat patokan yang berupa aturan-aturan yang adil dan beradab yang diberlakukan secara terkendali dan konsisten oleh penegak hukum atau polisi yang bersih dan berwibawa. Perlunya diberlakukannya aturan-aturan yang mengacu pada hukum positif di kabupaten Sambas karena kebudayaan Melayu telah dilemahkan fungsinya dalam kehidupan di tempat-tempat umum, terutama di daerah perkotaan. Kita juga dapat mengatakan bahwa kebudayaan dominan Melayu telah dihancurkan oleh sistem nasional yang kebijaksanaan-kebijaksanaan oknum-oknum pejabatnya melakukan KKN, dan oleh dominasi premanisme Madura. Karena polisi di lapangan juga takut pada kekerasan dan premanisme Madura dan juga karena polisi serta aparat keamanan dan hukum tidak bersih dari sejumlah praktik KKN, maka juga kesewenang-wenangan premanisme Madura telah mendorong untuk terciptanya serta mantapnya pembatas yang tegas antara sukubangsa Madura dengan sukubangsa Melayu dan Dayak. Dan dampaknya adalah bahwa orang-orang Madura sendiri menganggap bahwa kecurangan-kecurangan dan kekerasan yang mereka lakukan terhadap orang Melayu dan terhadap anggota-anggota sukubangsa lainnya adalah suatu yang wajar.

Konflik antar-sukubangsa di Sambas pada tahun 1999 yang terwujud sebagai kerusuhan dalam bentuk pembunuhan atau pembantaian dan pencurian serta penghancuran

dimiliki orang Madura oleh orang Melayu dan orang Dayak adalah berbeda dari konflik ideologi. Bila konflik ideologi dapat dirundingkan dan didamaikan melalui tawar-menawar di antara pihak-pihak yang bermusuhan, maka pada waktu konflik antar-sukubangsa yang berdarah itu terjadi dan bergulir tidak mungkin lagi untuk dapat dihentikan atau didamaikan. Hanya pada tahap-tahap permulaan dan pada tahap sebelumnya meledak menjadi konflik berdarah maka konflik antar-sukubangsa itu dapat didamaikan, atau pada saat telah terjadi kejenuhan dan tercapainya tujuan konflik oleh salah satu pihak.

Bila dalam konflik ideologi adalah salah satu pihak yang berlaku curang maka kecurangan tersebut masih dapat ditawarkan dengan imbalan kompensasi dari yang berlaku curang kepada yang dicurangi tetapi dalam konflik antar-sukubangsa bila salah satu pihak berlaku curang atau tidak menepati perjanjian yang telah dibuat bersama maka kecurangan pihak lawan akan mengakumulasi kebencian dan semangat penghancuran dari yang dicurangi terhadap yang mencurangi dan akan meledak dalam tindakan penghancuran dalam konflik antar-sukubangsa yang berdarah seperti yang terjadi di kabupaten Sambas. Karena konflik antar-sukubangsa adalah konflik yang bercorak primordial, dimana keseluruhan pikiran dan perasaan terungkap dalam perwujudan-perwujudan penghancuran total terhadap pihak lawan.

Dalam kerusuhan berdarah di Sambas di tahun 1999, perjuangan untuk keberadaan dan kelangsungan hidup serta untuk kehormatan yang dipunyai oleh orang Madura di satu pihak dan orang Melayu serta orang Dayak di pihak lain adalah berbeda. Bila orang Melayu dan orang Dayak berjuang untuk memperoleh apa yang selama ini mereka rasakan telah dirampas dan dihancurkan oleh orang Madura melalui berbagai bentuk kekerasan dan kesewenang-wenangan, maka bagi orang Madura perjuangan melawan serangan orang Melayu dan orang Dayak adalah upaya untuk mempertahankan posisi-posisi serta peranan-peranan yang selama ini mereka nikmati sebagai sebuah golongan sosial yang dominan dan ditakuti di kabupaten Sambas. Dengan kata lain, mereka itu berjuang untuk mengambil alih kembali apa yang telah diporakporandakan oleh orang Melayu dan Dayak. Sebagai akhir kata dapat dikatakan bahwa permasalahan hubungan antar-sukubangsa di Sambas dan di Kalimantan Barat masih akan berbuntut panjang, karena pemerintahan telah tidak menangani masalah ini dengan secara bersungguh-sungguh.

Sebagai akhir kata, konflik berdarah antara orang Melayu dan Dayak di satu pihak dengan orang Madura di pihak lain, hanya berlangsung dalam wilayah kabupaten Sambas. Konflik berdarah ini tidak sampai melebar ke wilayah kabupaten Pontianak atau di kabupaten lain.

Pontianak dan kabupaten Pontianak dijadikan tempat penampungan dan pemukiman kembali para pengungsi Madura asal Sambas yang tidak mau dipulangkan ke tempat asalnya di Madura. Ini sesuai dengan tesis yang ingin dikemukakan dalam tulisan ini, yaitu bahwa konflik antar-sukubangsa adalah produk dari corak hubungan antar-sukubangsa yang berlaku setempat.

Catatan:

*) Peranan kepemimpinan dari para tokoh politik, ekonomi dan keagamaan atau elite sukubangsa dalam negara kesatuan yang masyarakatnya majemuk akan dibahas dalam tulisan tersendiri.

(1) Saya mengucapkan terima kasih kepada Kapolri, Jenderal (Pol) Roesmanhadi atas penunjukkan sebagai Ketua Tim Penelitian Kerusuhan Sambas dan atas dukungan biaya dan fasilitas yang telah diberikan. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Kapolda Kalbar, Kombes Chaerul Rasyidi beserta seluruh jajarannya atas segala bantuan dan fasilitas selama penelitian di lapangan.

Anggota-anggota tim terdiri atas: Prof. Dr. S. Boedisantoso, Prof. Dr. Sarlito Wirawan, Prof. Dr. Sardjono Jatiman, Kombes Pol Drs. Bekto Suprpto, MSI, dan Kombes Pol. Drs. Agus Wantoro, MSI.

(2) Sebagian besar uraian dan pembahasan mengenai kerusuhan

tulisan saya yang berjudul "Kerusuhan Sambas", Jurnal Polisi Indonesia, (vol.2: 71-85, 2000). dan dari "Laporan Kerusuhan Sambas" yang disampaikan kepada Kapolri pada tahun 1999.

Acuan Kepustakaan

Aragon, V. Lorraine

2001 "Communal Violence in Poso, Central Sulawesi: Where people Eat Fish and Fish Eat People". *Indonesia*, No.2: 45-80. Cornell South-east Asia Program

Barth, Fredrik

1969 "Introduction". Dalam Fredrik Barth (ed.), *Ethnic Groups and Boundaries*, Boston: Little, Brown, and Co. Hal. 9-38

Bruner, Edward M.

1974 "The Expression of Ethnicity in Indonesia". Dalam Abner Cohen (Ed.), *Urban Ethnicity*. London: Tavistock. Hal. 251-288.

Colombijn, Freek dan J. Thomas Lindblad

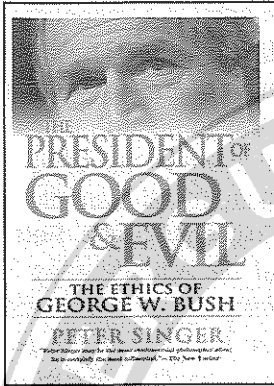
2002 "Introduction". Dalam Freek Colombijn dan J. Thomas Lindblad (eds.), *Roots of Violence in Indonesia*. Leiden: KITLV Press. J=Hal. 1-31

Douglas, Mary

1966 *Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo*, London: Routledge and Kegan Paul

- Suparlan, Parsudi
- 1972 *The Javanese in Bandung: Ethnicity in an a Medium Indonesia City*. MA Thesis. University of Illinois
- 1979 "Ethnic Groups in Indonesia". *The Indonesian Quarterly*, Vol. 2 No.7, 53-75, CSIS
- 1986 "Kebudayaan dan Pembangunan", *Media IKA*, Vol. 14, no. 11, 106-135, Jurusan Antropologi, U.I.
- 1995 *The Javanese in Surinam: Etnicity in an Ethnically Plural Society*. Tempe, Arizona: Center for Southeast Asian Studies, Arizona State University
- 1998 "Konflik antara Orang Dayak dan Orang Madura". *Wacana Antropologi*, Vol. 2, No. 2, 7-9, Asosiasi Antropologi Indonesia
- 1999a "Masyarakat Majemuk dan Hubungan Antar-Sukubangsa". Dalam I. Wibowo (ed.), *Restropeksi dan Rekonstektualisasi Masalah Cina*. Jakarta: Gramedia. him. 149-173
- 1999b *Kerusuhan Sambas*. Laporan terbatas kepada Kapolri
- 1999c "Kemajemukan, Hipotesa Kebudayaan Dominan dan Kesukubangsaan". *Jurnal Antropologi Indonesia*. No. 58, 13-20.
- 2000a "Kerusuhan Sambas". *Jurnal Polisi Indonesia*, Vol. 2, 71-85
- 2000b "Masyarakat Majemuk dan Perawatannya". *Jurnal Antropologi Indonesia*, No. 63: 1-13
- 2000c "Kesetaraan Warga dan Hak Budaya Komuniti dalam Masyarakat Majemuk Indonesia". *Jurnal Antropologi Indonesia*, no. 66: 1-12
- 2001 "Ethnic and Religious Conflict in Indonesia". *KULTUR: The Indonesian Journal for Muslim Culture*, No.2: 41-58
- van den Berghe, Pierre J.
- 1990 "Introduction". Dalam Pierre J. van den Berghe (ed.), *State Violence and Ethnicity*. University Press of Colorado. Hal. 1-18

BERITA BUKU



THE PRESIDENT OF GOOD AND EVIL

The Ethics of George W. Bush

Oleh: Peter Singer

New York: Dutton

Terbit: Maret, 2004

Hard Cover, 281 hal., Indeks.

Buku ini mengupas etika presiden George W. Bush sebagaimana yang dapat ditemukan dalam pidato-pidatonya, tulisan-tulisannya, dan berbagai komentar yang diberikannya, maupun dalam keputusan-keputusan yang diambilnya sebagai pejabat negara yang dipilih oleh rakyatnya. Presiden Bush, menurut Peter Singer adalah presiden yang paling banyak berbicara mengenai moral dan etika di antara semua presiden Amerika Serikat. Secara sarkastik Peter Singer menyatakan bahwa presiden Bush adalah seorang moralis yang prominen, karena tidak pernah ada seorang presiden Amerika pun yang begitu banyak membuat pernyataan mengenai kebaikan dan setan, benar dan salah selain, presiden Bush. Dalam pidato pengukuhan sebagai presiden, Bush berniat membangun "bangsa (Amerika) yang berperikeadilan dan adanya kesempatan (kerja)". Setahun kemudian dia memproklamasikan Korea Utara, Iran dan Irak sebagai sebuah "noros setan". Dia

mengomentari perdagangan bebas sebagai "keharusan moral". "Keharusan Moral" yang lainnya menurut dia adalah meniadakan kelaparan dan kemiskinan di seluruh dunia. Untuk itu dia juga menyatakan bahwa "kebutuhan ekonomi terbesar Amerika adalah standard etika yang lebih tinggi".

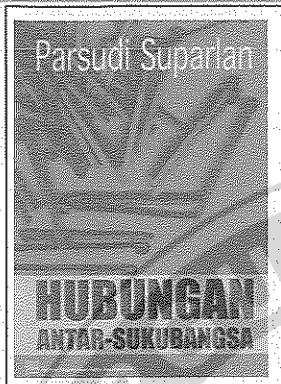
Peter Singer menunjukkan bahwa Bush telah berbicara mengenai setan dalam 319 pidato yang disampaikan secara terpisah, atau 30 persen dari semua pidato yang disampaikan antara pidato pengukuhan sebagai presiden sampai dengan 16 Juni 2003. Menurut Singer, Bush lebih banyak menggunakan kata "setan" sebagai kata benda (914 kali) dari pada kata sifat (182 kali). Peter Singer berkesimpulan bahwa nampaknya Bush mengartikan setan bukan sebagai itikad, atau bahkan bukan juga sebagai orang, tetapi lebih sebagai benda atau sebagai sebuah kekuatan, yaitu sesuatu yang betul-betul ada yang terpisah dari tindakan-

mau menang sendiri yang biasanya manusia mampu untuk melakukannya.

Peter Singer tidak hanya mengidentifikasi banyaknya kata-kata moral, kebaikan, kemanusiaan, kebebasan, individualitas, penyiksaan, kesewenang-wenangan, perang, kematian dan setan yang digunakan oleh George Bush, tetapi dia mencoba memahaminya dari berbagai perspektif dan memahaminya sebagaimana yang ada dalam kenyataan-kenyataan yang dipraktikkan oleh pemerintahan Bush, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Singer menggunakan filsafat, agama dan terutama agama Kristen, kedermawanan, dan keyakinan dalam upaya menelusuri acuan etika dan moral dari Bush, tetapi dia tidak menemukan acuan tersebut secara meyakinkan. Bahkan yang ditemukan adalah kontradiksi-kontradiksi. Di satu pihak Bush misalnya, kata Peter Singer, menolak aborsi dan menjadikannya sebagai undang-undang anti aborsi dengan alasan sebagai tidak bermoral karena membunuh embrio yang belum lahir, tetapi membunuh orang sipil dengan 'tidak sengaja' dalam perang (1.000 orang di Afganistan dan lebih dari 4.000 orang di Irak) dapat dibenarkan.

Contoh-contoh mengenai kontradiksi-kontradiksi ini dikemukakan oleh Peter Singer, yang intinya secara sinikal mengungkapkan adanya pembenaran-pembenaran atas sesuatu kebijakan politik, ekonomi, sosial yang diberlakukan di dalam negeri maupun dalam hubungan internasional dengan menggunakan idiom moral dan etika. Inilah sebuah "hipokrisi", kata Peter Singer, "... *what he actually does is always in the interests of his Texan friends in the oil industry, or the big corporations and wealthy individual donors who contribute so heavily to his campaign coffers*" (halaman 5).

Inilah sebuah buku yang isinya mengungkapkan sisi lain dari presiden George Bush sebagai presiden Amerika Serikat, pahlawan anti terorisme, dan penguasa tertinggi dari polisi dunia. Untungnya penguasa tertinggi dari polisi dunia ini dari negara demokratis, sehingga langkah-langkah kebijakannya masih dalam batas-batas demokrasi dan kebebasan. Barangkali jika sekiranya buku seperti ini muncul dan diterbitkan di Indonesia akan ada pemimpin yang marah dan menyatakan bahwa 'darah si penulis halal'.



HUBUNGAN ANTAR-SUKUBANGSA

Oleh: Parsudi Suparlan

Jakarta: Yayasan Pengembangan
Kajian Ilmu Kepolisian

Terbit: Maret, 2004

Soft Cover, 343 hal., tanpa Indeks.

Hubungan Antar-Sukubangsa adalah sebuah buku yang merupakan karya asli dari penulisnya, berdasarkan atas kuliah-kuliah yang telah diberikannya di Departemen Antropologi, U.I., Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, dan Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian U.I., serta berdasarkan atas penelitian-penelitian lapangan yang telah dilakukannya. Isi buku terdiri atas dua bagian, yaitu Bagian I, yang terdiri atas 15 bab berisikan teori dan konsep-konsep mengenai sukubangsa dan berbagai konsep yang terkait dengan sukubangsa. Bagian II, berisikan tulisan-tulisan yang membahas berbagai topik permasalahan mengenai kebudayaan, masyarakat majemuk, dan konflik antar-sukubangsa.

Uraian dan pembahasan dalam Bagian I dimulai dari konsep-konsep dasar mengenai apa itu sukubangsa, dilanjutkan secara bertahap mengenai konsep-konsep dan teori-teori yang lebih kompleks mengenai hubungan antar-sukubangsa, kesukubangsaan, dan bagaimana kesukubangsaan itu

kekerabatan, kerjasama, persaingan, dan konflik. Uraian dan pembahasan selanjutnya adalah mengenai konsep-konsep dan teori masyarakat majemuk, agama dan sukubangsa, politik nasional dan politik lokal, hukum adat dan keadilan, kehidupan ekonomi dalam perspektif hubungan antar sukubangsa dan kemunculan serta diaktifkannya kesukubangsaan. Bagian I ini ditutup dengan pembahasan mengenai konsep dan teori mayoritas, dominan dan minoritas, dan multikulturalisme.

Uraian dan pembahasan dalam Bagian II, tertuang dalam 14 tulisan dengan topik-topik mengenai hubungan antar-sukubangsa, dan topik-topik yang berkaitan dengan dan mendukung teori dan konsep-konsep mengenai hubungan antar-sukubangsa. Empat belas tulisan tersebut diambil dari tulisan-tulisan penulis yang telah diterbitkan di sejumlah jurnal ilmiah di Indonesia. Urutan-urutan dari penyajian tulisan-tulisan di Bagian II ini disesuaikan dengan tahapan-tahapan pengembangan teori dan konsep-konsep hubungan antar-sukubangsa samnai

dengan teori dan konsep-konsep pendukung bagi pemahaman hubungan antar-sukubangsa dan berbagai implikasi sosial dan politiknya.

Buku ini berguna untuk kita semua, karena dalam buku ini kita diajak untuk memahami diri kita sebagai orang Indonesia yang hidup dalam masyarakat majemuk, dengan beraneka sukubangsa dan kebudayaan sukubangsanya masing-masing. Dengan pemahaman tersebut diharapkan bahwa kita menjadi lebih peka, dewasa dan matang dalam

kehidupan sosial dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga konflik-konflik antar-sukubangsa dan / atau antar-keyakinan keagamaan yang berdarah dan yang sia-sia karena mengorbankan banyak nyawa dan harta benda dapat dihindari. Ini sejalan dengan cita-cita almarhum Profesor Koentjaraningrat melalui penerbitan buku yang dieditnya, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, yang sampai sekarang masih dicetak ulang sejak diterbitkannya pertama kali pada tahun 1970.



BERITA-BERITA PPSN

Pusat Pengkajian Strategi Nasional (PPSN) sebagai lembaga pengkajian adalah sebuah yayasan yang bekerja otonom dan non-partisan. PPSN dibentuk atas prakarsa Prof. Dr. Juwono Soedarsono, M.A. dan Laksamana TNI (Purn) Widodo A.S., didukung oleh beberapa rekan, yang memiliki komitmen sama terhadap upaya proaktif dan partisipatif dalam pemecahan masalah nasional strategis.

Organisasi ini didirikan berdasarkan akte notaris Sovyedi Andasasmita, S.H., Nomor 11, pada tanggal 11 Juli 2003 dengan maksud memanfaatkan potensi dan kemampuan yang ada dalam rangka memberikan sumbangan positif bagi perkembangan dan pengembangan kehidupan bangsa Indonesia.

Dengan lokasi kantor sementara di Komplek Indrasentral Cempaka Putih dengan alamat Jl. Letjen Suprpto No. 60/AN, Jakarta Pusat, secara fisik PPSN baru melaksanakan kegiatannya mulai Maret 2004. Kegiatannya diarahkan untuk melaksanakan serangkaian pengkajian berlanjut terhadap masalah nasional krusial mendesak atau isu strategis dan dikerjakan oleh para ahli di bidangnya. Hasil kajiannya diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pihak yang memerlukannya antara lain para

pejabat pemerintahan, para pejabat organisasi privat ataupun publik.

Selain melakukan pengkajian masalah nasional strategis, PPSN juga menerbitkan jurnal dengan nama NASION, memuat tulisan baik yang sifatnya ilmiah ataupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah-masalah aktual nasional dan internasional yang diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai kalangan masyarakat.

Metode dan hasil kajian diarahkan agar senantiasa fokus, tajam, kritis, relevan, mutakhir namun beretika untuk membantu proses pemecahan isu strategis nasional secara cepat, tepat, akurat, komprehensif dan efektif.

PPSN memiliki visi berperan secara aktif dalam pemecahan masalah pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat multikultural, yang bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat, dan bisnis. Adapun misinya, adalah: (1) melaksanakan berbagai kajian untuk memecahkan masalah nasional strategis pada tataran kebijakan yang dapat dioperasionalkan dalam aspek politik, hukum, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan-keamanan nasional; (2) melaksanakan penerbitan secara terjadwal untuk mengekspresikan keberadaan dan produk-produk hasil kajian PPSN; (3) menjadi

kerjasama dengan berbagai pihak melalui kegiatan pengkajian, seminar, lokakarya dan kerjasama saling menguntungkan lainnya; (4) mengembangkan kapasitas dan kemampuan internal PPSN dalam rangka menunjang pengembangan organisasi.

Agar supaya visi dan misi di atas dapat diwujudkan, kerangka organisasi PPSN disusun meliputi : (1) Dewan Pembina terdiri dari dua sampai tujuh orang dikepalai seorang Ketua Dewan Pembina; (2) Dewan Pengawas terdiri dari dua sampai tujuh orang dikepalai seorang Ketua Dewan Pengawas; (3) Dewan Pakar terdiri dari dua sampai tujuh orang dikepalai oleh seorang Ketua Dewan Pakar; (4) Dewan Penasihat, terdiri dari dua sampai tujuh orang dikepalai oleh seorang Ketua Dewan Penasihat; (5) Dewan Pengurus, terdiri dari Ketua Umum, Ketua Harian, Sekretaris, dan Bendahara; (6) Kelompok Kerja (Pokja) Adhoc, terdiri dari dua orang atau lebih, dikepalai oleh seorang ketua dan beranggotakan para pakar terpilih, sesuai dengan materi kajian; (7) Penerbitan, terdiri dari Pelindung, Penanggung Jawab, Dewan Redaksi, dan Redaktur Pelaksana.

Sebagai sebuah organisasi yang otonom, bebas dan bertanggung jawab, pengembangan PPSN ke masa depan tetap akan memperhatikan asas fleksibilitas dan manfaat, lebih luas cakupan kegiatannya, misalnya kerjasama saling menguntungkan dengan berbagai pihak (dalam dan luar negeri), bidang pendidikan siap pakai dan advokasi kepentingan masyarakat

luas, yang di masa mendatang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Kegiatan-kegiatan PPSN

Sejak awal pembentukannya sampai dengan bulan Juni 2004 untuk mengekspresikan eksistensinya PPSN telah melaksanakan serangkaian kegiatan penting antara lain: (1) Perancangan struktur organisasi, melengkapinya dengan peralatan yang dibutuhkan, instrumen pengatur, pengawakan dan administrasi serta logistiknya; (2) Pemutakhiran informasi isu strategis nasional, regional dan internasional dengan mengundang beberapa pakar antara lain:

- (i) Bapak Adnan Ganto tentang *Perkembangan Ekonomi Nasional, Regional Dan Global*;
- (ii) Bapak Mayjen TNI Bambang Darmono, mantan Pangkoops Daerah Darurat Militer Aceh tentang *Perkembangan Kondisi Aceh Era Darurat Militer I dan II*;
- (iii) Ibu Farida Samsi Charida, SH, MH., anggota komisi konstitusi tentang *Wawasan Kebangsaan, Nasionalisme Dan Persatuan Kesatuan Dalam Amandemen UUD 45*.

(3) Perintisan awal pembentukan *website* dan pusat berita dan data informasi PPSN; (4) Persiapan penerbitan jurnal PPSN dengan nama NASION; (5) Peluncuran edisi perdana jurnal NASION dan diskusi panel tentang Penguatan Wawasan Kebangsaan Dalam Pemecahan Masalah Strategis Bangsa, pada awal Juni 2004; (6) Persiapan dan perencanaan seminar akhir tahun

RIWAYAT PENULIS

Daniel Sparringa, Ph.D

Ahli Sosiologi dan Ilmu Politik, Pengajar Senior di Universitas Airlangga, Surabaya

Prof. Dr. Juwono Soedarsono

Ahli Ilmu Politik dan Hubungan Internasional, Guru Besar Universitas Indonesia, sekarang bertugas sebagai Duta Besar R.I. di Inggris

Prof. Mardjono Reksodiputro, SH., MA.

Ahli Hukum dan Ahli Kriminologi, Guru Besar Universitas Indonesia, Konsultan Hukum

Prof. Sutandyo Wignjosoebroto, MPA

Ahli Administrasi dan Sosiologi, Guru Besar Universitas Airlangga, Surabaya

Prof. Parsudi Suparlan, Ph.D

Ahli Antropologi, Guru Besar Universitas Indonesia, Jakarta

